**SOAL-SOAL PEMBEBASAN IRIAN BARAT**

1 Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) merupakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya pembebasan Irian Barat kepada Indonesia secara utuh. Pepera sendiri tertuang dalam. .

a Perjanjian London

b Perjanjian New York

c Perjanjian Renville

d Perjanjian Linggarjati

e Perjanjian Roem-Royen

Jawaban: B Perjanjian New York

Isi Perjanjian New York:

1 Belanda menyerahkan Irian Barat pada UNTEA selambatnya 1 Okt 1962

2 Pemerintah Sementara PBB menggunakan tenaga Indonesia

3 Angkatan Perang Belanda kembali secara berangsur-angsur, Angkatan Perang Indonesia di Irian Barat di bawah pemerintah sementara PBB

4 pada 1 Desember 1962 Bendera Indonesia mulai dikibarkan di Irian Barat, di samping bendera PBB

5 Pemerintah Indonesia wajib melakukan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)

Isi Perjanjian London: Belanda memperoleh daerah koloninya kembali yang telah dijajah Inggris termasuk wilayah Hindia Belanda

Isi Perjanjian Linggarjati:

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.

Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949.

Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negeri Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia (RI).

RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya..

Isi Perjanjian Renville

Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia (RI).

Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah RI dan daerah pendudukan Belanda.

TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.

ISI PERJANJIAN ROEM ROYEN.

Pemerintahan RI, termasuk para pemimpin yang ditawan, akan dikembalikan ke Yogyakarta.

Kedua pihak, Belanda dan Indonesia, sepakat untuk melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan digelar di Den Haag, Belanda.

2. Pepera sendiri sempat ditunda pada masa kepemimpinan Soekarno dikarenakan

a kemelut G30S/PKI di Indonesia

b Belanda menghambat rencana pelaksanaan Pepera

c konflik warga Irian Barat dengan pemerintah Indonesia

d Pemerintahan Soekarno kurang tegas dalam menuntaskan kasus Irian Barat

e Warga Irian Barat menolak sementara Pepera

Jawaban: A

Kemelut G30S/PKI merupakan salah satu faktor penyebab ditundanya Pepera di Irian Barat

3 Berikut yang bukan merupakan upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka pembebasan Irian Barat

a Diplomasi dengan Belanda pada tahun 1950, 1952, 1954

b Mengajukan masalah Irian Barat ke Forum PBB

c Diplomasi aktif pada Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955

d Pemerintah Indonesia menyerahkan kekuasaan Irian Belanda kepada Belanda

e Pemerintah Indonesia membentuk FNPIB

Jawaban: D

D merupakan merelakan Irian Barat ke tangan Belanda dan bukan merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam rangkat membebaskan Irian Barat

4. Berikut adalah salah satu bentuk konfrontasi politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka Pembebasan Irian Barat dari Belanda adalah

a. pembatalan hubungan uni Indonesia Belandq secara sepihak yang dikukuhkan pada UU 13 tahun 1956

b membentuk pemerintahan Irian Barat sementara di Tidore pada 17 Agustus 1956

c pemindahan pasar komoditas dari Belanda ke Jerman

d membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) 1958

e memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada 17 Agustus 1960

JAWABAN: C

pemindahan pasar komoditas dari Belanda ke Jerman merupakan bentuk konfrontasi ekonomi kepada Belanda

5 Konfrontasi Ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka Pembebasan Irian Barat berupa..

a membatalkan hutang Indonesia ke Belanda sebesar 3.661juta gulden

b melarang penerbangan maskapai Belanda di Indonesia

c a,b,d salah

d mengambil alih perusahaan Belanda di Indonesia

e a,b,d benar

JAWABAN E

opsi a, b,d merupakan bentuk konfrontasi ekonomi kepada Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat

6. Judul Pidato Presiden Soekarno pada Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 adalah Bangsa Indonesia akan memperkeras sikapnya kepada Belanda dalam hal Pembebasan Irian Barat

a. Membangun Dunia Kembali

b. Merah Putih

c. Ganyang Belanda

d. Bebaskan Irian Barat

e. Proklamasi

JAWABAN: A

Membangun Dunia Kembali adalah judul Pidato Presiden Soekarno pada Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960

7. Konfrontasi militer merupakan upaya terakhir setelah diplomasi, konfrontasi politik, dan konfontasi ekonomi dalam rangka membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Upaya ini berupa mencari bantuan senjata ke luar negeri yang dipimpin oleh

a A. H. Nasution

b Soeharto

c Soegiyono

d S Parman

e MT Haryono

JAWABAN: A

A. H. Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional Indonesia memimpin konfrontasi militer tersebut

8. Komando yang dikeluarkan Presiden Soekarno dalam rangka mengajak seluruh rakyat untuk terlibat langsung dalam konfrontasi militer pembebasan Irian Barat dilakukan di. . . dan pada tanggal. . .

a Jakarta, 21 Desember 1961

b Bandung, 30 November 1962

c Semarang, 23 Januari 1963

d Subang, 6 April 1962

e Yogyakarta, 19 Desember 1961

JAWABAN: E

Trikora dikeluarkan di Yogyakarta, 19 Desember 1961

9. Tahapan strategi Komando Mandala yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dalam rangka Pembebasan Irian Barat adalah

a eksploitasi - konsolidasi - infiltrasi

b eksploitasi - infiltrasi - konfrontasi

c konsolidasi- konfrontasi - ekspoitasi

d. infiltrasi - eksploitasi - konsolidasi

e konfrontasi - eksploitasi - infiltrasi

JAWABAN: D

Tahapan strategi Komando Mandala yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dalam rangka Pembebasan Irian Barat adalah infiltrasi - eksploitasi - konsolidasi. biar mudah menghafal singkat saja IEK.

10. Pepera pada masa orde baru (14 Juli - 4 Agustus 1969) diatur oleh. . . dan diawasi secara langsung oleh perwakilan PBB yaitu....

a. Sjahrir; Van Poll

b Brigjen Sarwo Edhi W; Fernando Ortis Sanzs

c A. H. Nasution; W. Bunker

d Adam Malik; De Boer

e Soekarno; Prof Schermerhorn

JAWABAN: B

diatur oleh Brigjen Sarwo Edhi W; diawasi oleh Fernando Ortis Sanzs